

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Pendidikan adalah suatu hal yang penting bagi suatu bangsa, karena sejatinya pendidikan dapat menjadikan suatu bangsa menjadi lebih beradab, secara umum pendidikan juga dimaknai sebagai upaya yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus untuk mengubah dari yang sebelumnya tidak mengetahui akan sesuatu lantas menjadi tahu akan sesuatu tersebut.

Pendidikan berkaitan erat dengan kemerdekaan, karena sejatinya dengan mendapatkan pendidikan bangsa Indonesia mampu tersadarkan dari penindasan dan mampu meraih kemerdekaan. Terbukti, banyak dari tokoh-tokoh kemerdekaan bangsa yang mendapat pendidikan baik itu di Negeri Belanda maupun Indonesia yang berkat pemikiran dan gagasannya mampu mengantarkan bangsa ini ke jalan kemerdekaan. Pasca kemerdekaan mulai lah dibentuk suatu sistem tatanan kehidupan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila, salah satunya adalah dalam hal pendidikan. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 terdapat kalimat “mencerdaskan kehidupan bangsa” hal ini menunjukkan bahwasannya pendidikan adalah salah satu tujuan dari bangsa Indonesia berdiri.

Pada masa Orde Baru, pendidikan diarahkan untuk memurnikan maupun meluruskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang

dianggap sudah melenceng pada saat Orde Lama, karena kebijakan pendidikan pada saat itu diarahkan kepada proses indoktrinasi dan menolak segala unsur budaya yang datang dari luar (Tilaar, 2004). Untuk mencapai hal tersebut pemerintah menerapkan program kerja Pembangunan Lima Tahun (pelita). Dalam program kerja Orde Baru pada Pelita I diakhir tahun 1969 terdapat kebijakan khusus untuk memberantas buta huruf, pada Pelita II tahun 1974 pemerataan pendidikan dijadikan kebijakan pokok, selanjutnya ditahun 1979 pada saat Pelita III Soeharto dalam Inpresnya menerapkan untuk membangun sarana sekolah dasar dan pada Pelita IV dikhususkan untuk lebih meningkatkan kebijakan pemerataan dan perluasan pendidikan sehingga terciptalah wajib belajar sekolah dasar (Tilaar, 1995). Namun, pada kenyataannya pendidikan Orde Baru dirasa sentralistik. Berbicara perihal pendidikan maka tidak akan lepas dari sekolah, melalui lembaga sekolahlah pemerintah menerapkan ide yang sesuai dengan visi yang ingin dituju oleh pemerintah.

Perbedaan sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah Orde Baru telah menyebabkan diskriminasi pada sekolah yang dikelola Yayasan / Perorangan atau swasta. sehingga memarjinalkan pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Kondisi ini menyebabkan adanya jurang pemisah antara sekolah dasar “negeri” dan “swasta”. Mayoritas dana, sarana dan perhatian pemerintah dipusatkan pada sekolah negeri, sehingga kualitas sekolah swasta terabaikan (Matsuhu, 2004). Pemerintah pada saat itu gencar dalam hal membangun sekolah, pada realitanya hanya berfokus kepada sekolah-sekolah

yang dibangun oleh pemerintah, sehingga pada kondisi tersebut mematkan sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta). Padahal jika dilihat secara historis, kemunculan sekolah swasta merupakan imbas dari kurangnya sekolah negeri yang ada di beberapa kecamatan saja dan tidak bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Pada dasarnya kemunculan sekolah swasta juga didukung oleh Undang-Undang No.2 Tahun 1989 Bab 13 Pasal 47, tentang tentang masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Pendidikan Nasional (Muhammad Rifa'i, 2017)

Dengan kehadiran sekolah swasta (sekolah dasar) sebagai mitra pemerintah yang dijamin oleh Undang-Undang dalam penyelenggaraan pendidikan, pembangunan sekolah yang diinisiasi oleh masyarakat seharusnya dibantu dalam hal pembiayaan oleh pemerintah, mengingat bahwasannya sekolah-sekolah ini pasti membutuhkan dana subsidi dari pemerintah untuk menjalankan sekolah tersebut. Dengan kata lain, pemerintah juga harus mampu mendukung pembiayaan sekolah dasar swasta tersebut, tetapi dengan adanya pengelompokan status sekolah dasar swasta pun juga berpengaruh terhadap subsidi yang diberikan, hanya sekolah berstatus diakui dan disamakan yang mendapat subsidi tersebut. Akibatnya sekolah dasar swasta yang tidak mendapat subsidi kesulitan untuk mengembangkan sarana maupun pra sarananya dan bahkan kesulitan untuk bersaing dengan sekolah lainnya. Di sisi lain sekolah tersebut harus

menemukan cara agar mendapatkan dana demi mempertahankan kelangsungan sekolahnya.

Kebijakan kontroversial juga pernah diterapkan pada saat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daed Joesoef dengan mengeluarkan kebijakan pengurangan subsidi untuk sekolah-sekolah swasta (Darmaningtyas, 2004). Sebagai langkah lain dalam menyikapi penolakan ajuan subsidi oleh pemerintah, langkah yang diambil oleh sekolah swasta adalah bergabung dengan Yayasan, hal tersebut guna mendapat suntikan dana untuk terus menyelenggarakan pendidikan. Namun, bergabungnya sekolah dengan suatu Yayasan memiliki dampak bahwa segala keputusan dari pihak sekolah harus melalui persetujuan dari Yayasan, dengan kata lain Yayasan memegang kontrol dan peranan besar terhadap aktivitas dan kebijakan yang diterapkan sekolah. Tentu hal tersebut akan berpengaruh pada output dan juga keputusan yang berkaitan dengan operasional sekolah. Selanjutnya, pendidikan masa Orde Baru yang dianggap sistematis dalam perencanaan dalam memajukan dunia pendidikan namun pada kenyataannya tidak demikian. Pemerintahan Orde Baru yang sentratistik berakibat pada tidak meratanya akses dunia pendidikan bagi masyarakat yang ada di pelosok negeri dan menutup ruang gerak kreativitas, pengembangan dan improvisasi pendidikan yang sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat setempat (Tilaar, 1999).

Pasca runtuhnya Orde Baru memunculkan otonomi daerah sebagai salah satu agenda Reformasi, hal ini berdampak pula kepada dunia

pendidikan yang kala itu bersifat sentralistik termasuk otonomi pendidikan dengan maksud memberikan peran dan tanggungjawab kepada setiap daerah agar tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Didasarkan oleh UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang diperkuat dengan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka pendidikan digiring pada pengembangan lokalitas, dimana keberagaman sangat diperhatikan. Masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan satuan pendidikan atau yang lebih dikenal sebagai Otonomi Daerah, dalam Bab I ayat I dikatakan bahwa "Daerah otonom berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan" (Pratomo & Sari, 2002). Pada pemerintahan Habibie, Reformasi pendidikan difokuskan pada beberapa aspek antara lain adalah reformasi sistem pendidikan jangka pendek yang berencana untuk memberantas KKN yang terjadi selama Orde Baru. Hal itu ditujukan untuk membawa masyarakat Indonesia ke arah yang lebih terbuka, demokratis dan terciptanya mutu yang tinggi bagi dunia pendidikan. Selanjutnya reformasi sistem pendidikan jangka menengah atau sesudah pemilu 1999 adalah menata sistem berdasarkan prinsip desentralisasi yang nantinya berpengaruh terhadap intensitas kepedulian masyarakat terutama didesa, salah satunya dengan menggalakkan kembali partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan (sekolah swasta) (Tilaar, 1999). Dalam kisaran tahun 2000 pemerintah mulai semakin giat mencanangkan program-program untuk meningkatkan dunia pendidikan

seperti membangun sekolah-sekolah dasar negeri bahkan penyaluran bantuan dana. Dalam wajib belajar 9 tahun pemerintah juga menyelenggarakan beasiswa dan Dana Bantuan Operasional (DBO).

Sekolah negeri yang notabeneanya dibiayai oleh pemerintah menjadi lebih unggul dan berdampak pada meningkatnya kualitas serta anggapan masyarakat bahwasannya bersekolah di sekolah negeri akan lebih terjamin mulai dari melanjutkan pendidikan kearah yang lebih baik dan lebih terpendang dimata masyarakat. Namun, jika ditarik secara historis adanya sekolah swasta adalah sebuah alternatif yang mana pada saat itu tidak tertampungnya siswa yang hendak bersekolah namun terbatas dalam hal kuota, ataupun pembatasan secara sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Maka dari itu dikarenakan sekolah-sekolah yang digalang masyarakat ini tidak sepenuhnya dibantu oleh pemerintah maka masyarakat juga harus menanggung biaya dalam bentuk bayaran sekolah agar operasional sekolah tetap berjalan.

Dengan pemaparan di atas peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai Kebijakan Pemerintah Tentang Sekolah Dasar Swasta di Jakarta Selatan Periode 1999-2009. Pentingnya topik ini adalah untuk menjelaskan mengenai dampak otonomi daerah dalam hal pendidikan berkaitan dengan sekolah dasar swasta yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Selain itu sekolah dasar merupakan lembaga yang menjadi fondasi dalam mendidik generasi bangsa karena sekolah dasar bertujuan untuk meletakkan dasar-dasar pengetahuan, kecerdasan dan keterampilan.

Penelitian yang relevan dengan pembahasan penelitian ini skripsi yang berjudul *Pelaksanaan Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju* yang ditulis oleh Mauliyah, Universitas Muhammadiyah Makasar, tahun 2019. Penelitian tersebut berfokus pada pelaksanaan kebijakan pendidikan wajib belajar Sembilan tahun yang berada di Desa Bunde Kecamatan Sampang Kabupaten Mamuju dan factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pendidikan wajib belajar Sembilan tahun yang berada di Desa Bunde Kecamatan Sampang Kabupaten Mamuju.

Adapun skripsi penelitian lainnya adalah skripsi yang berjudul *Implementasi Kebijakan Pendidikan Bagi Siswa Penyandang Disabilitas di SD Negeri Taman Sari 1 Yogyakarta* oleh M. Sabiq Izzudin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2017. Penelitian yang dilakukan oleh M. Sabiq Izzudin tersebut berfokus pada impementasi kebijakan Pendidikan bagi penyandang disabilitas, kelebihan dan kekurangan implementas bagi siswa penyandang Disabilitas dan upaya dalam mengatasi permasalahan kebijakan Pendidikan bagi siswa penyandang Disabilitas.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian sejarah perlu adanya pembatasan spasial maupun temporal untuk mengkaji suatu permasalahan. Pembatasan perlu dilakukan agar penelitian dapat lebih mendalam, fokus, dan tidak melebar pada

permasalahan-permasalahan yang tidak perlu dan tidak sesuai konteks kajian. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas pokok permasalahan yang akan diangkat adalah Kebijakan Pemerintah Tentang Sekolah Dasar Swasta di Jakarta Selatan dalam kurun waktu 1999-2009.

Batasan spasial yang dipilih adalah Jakarta dan sekolah dasar swasta yang dimaksud adalah sekolah swasta secara umum / diselenggarakan untuk umum di bawah naungan Kementrian Pendidikan. Batasan temporal yang dipilih adalah kurun waktu 1999 sampai 2009. 1999 dipilih karena pada tahun tersebut mulai berlakunya sistem pendidikan yang desentralisasi dan diharapkan pendidikan mampu menyentuh seluruh daerah di Indonesia. Kemudian 2009 dipilih karena pemerintah pada saat itu memberlakukan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, pembatasan masalah dalam penelitian ini mencakup Kebijakan Pemerintah Tentang Sekolah Dasar Swasta Di Jakarta tahun 1999 – 2009. Pokok permasalahan tersebut memunculkan pertanyaan, yaitu:

- a. Bagaimana kebijakan pemerintah tingkat Sekolah Dasar Swasta pada tahun 1999-2009?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah bagi sekolah dasar swasta.
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah pada masa Reformasi dalam memajukan pendidikan sekolah dasar swasta.

2. Kegunaan Penulisan

Kegunaan penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah studi kepustakaan, baik dari prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta, maupun penulis lainnya yang ingin melakukan penelitian tentang perkembangan dunia pendidikan pada masa Reformasi konteksnya dalam hal ini adalah sekolah dasar swasta.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran dalam perkuliahan khususnya di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta sebagai refleksi historis bagi yang tertarik pada dunia pendidikan Indonesia.

D. Metode dan Pemilihan Sumber

1. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian sejarah yang lengkap dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, diperlukan serangkaian data dan fakta yang diperoleh melalui penelitian di lapangan yang meliputi empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

a. Heuristik/Pengumpulan Sumber

Pada tahap heuristik, penulis mengumpulkan sumber-sumber yang relevan mengenai kebijakan pemerintah tentang sekolah dasar swasta. Sumber yang dikumpulkan merupakan sumber sejarah. Sumber-sumber yang diperoleh penulis melalui studi kepustakaan yaitu menelusuri data-data yang ada baik data primer maupun data sekunder dari instansi terkait atau hasil studi yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai kebijakan pemerintah tentang sekolah dasar swasta. Sumber sejarah yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber tulisan dan lisan.

Sumber primer yang digunakan yaitu data jumlah gedung sekolah dasar swasta, jumlah murid sekolah dasar swasta dan angka kelahiran anak yang diakses dari Badan Pusat Statistik, selanjutnya dengan mewawancarai Kepala Sekolah SD Desa Putera, Kepala Sekolah SDS Strada Wiyatasana, dan Bagian Tata Usaha SDS Strada Wiyatasana. Lalu, sumber sekunder adalah sumber pendukung yang dapat digunakan untuk menggali informasi mendalam. Sumber

sekunder penelitian ini berupa buku-buku yang terkait dengan Kebijakan Pemerintah Tentang Sekolah Dasar Swasta, seperti : buku Mauhammad Rifa'I yang berjudul Sejarah Pendidikan Nasional: dari masa Klasik hingga Modern, buku Darmaningtyas yang berjudul Pendidikan rusak-rusakan, buku Nanang Martono yang berjudul Kematian sekolah swasta, buku Misbahul Munir yang berjudul Pembangunan Pendidikan di Indonesia Arah dan Kebijakan Pendidikan Pasca Krisis Ekonomi, buku H.A.R Tilaar yang berjudul Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Persepektif Abad 21, buku Darmaningtyas yang berjudul Pendidikan Yang Memiskinkan, buku H.A.R Tilaar yang berjudul Standarisasi Pendidikan Nasional : Suatu Tinjauan Kritis, buku Akhmad Muhaimin Azzet yang berjudul Pendidikan Yang Membebaskan, buku H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho dengan judul Kebijakan Pendidikan, buku Ade Irawan dkk yang berjudul mendagangkan sekolah, buku Matsuhu yang berjudul Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Abad 21, buku Kenji Tsuchiya yang berjudul Demokrasi dan Kepepemimpinan, Kebangkitan Gerakan Taman Siswa.

b. Verifikasi/Kritik Sumber

Verifikasi/Kritik sumber adalah tahap kedua dalam penelitian sejarah, kritik sumber adalah penilaian atau pengujian terhadap bahan-bahan sumber tersebut dari sudut pandang kebenarannya. Setelah mengetahui secara persis topik dan sumber yang

sudah dikumpulkan, tahap berikutnya yaitu verifikasi atau kritik sejarah, atau keabsahan sumber. Kritik penting untuk dilakukan dalam penelitian sejarah agar sumber dapat terjamin otentitas dan kredibilitasnya.

Data-data atau sumber-sumber yang didapat, dikritik baik secara ekstern maupun intern. Kritik ekstern adalah kritik terhadap keaslian atau otentitas data atau sumber. Kritik ekstern yang dilakukan penulis yaitu kritik terhadap jenis kertas, tanggal, waktu publikasi, nama pengarang, serta daftar riwayat hidup narasumber yang akan diwawancarai oleh penulis. Kemudian, penulis melakukan kritik intern guna mendapatkan kredibilitas sumber. Kritik intern dilakukan dengan membandingkan isi sumber tersebut dengan sumber-sumber lain. Kritik ekstern dilakukan dengan cara memeriksa kondisi fisik buku yang didapat oleh penulis. Kritik intern dilakukan penulis dengan cara membandingkann keterangan yang didapat melalui wawancara.

c. Interpretasi

Interpretasi merupakan sebuah tahapan penafsiran atas sumber-sumber yang telah didapat. Pada tahap ini penulis menafsirkan, merangkai, dan menghubungkan fakta-fakta yang relevan yang dapat disusun menjadi kisah sejarah. Terdapat dua macam proses interpretasi, yaitu analisis dan sintetis. Analisis berarti menguraikan, sedangkan sintetis berarti menyatukan. Interpretasi yang dilakukan penulis adalah dengan menguraikan berdasarkan analisis dengan

membandingkan sumber-sumber yang telah didapat lalu menyatukannya agar menghasilkan rekonstruksi sejarah yang benar dalam sebuah tulisan.

d. Historiografi

Historiografi adalah tahapan terakhir atau penyajian dalam bentuk tulisan. Sebagai Langkah yang terakhir dalam metode sejarah, historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan (Abdurahman, 1999). Metode penulisan deskriptif naratif adalah penulisan sejarah yang menguraikan kejadian sebagai proses, yang memuat uraian naratif atau cerita yang mengungkapkan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, dilengkapi dengan fakta-fakta sejarah tentang apa, siapa, kapan, dan dimana (Kartodirdjo, 1993).